

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

A. Keadaan Wilayah Kabupaten Belitung

Kabupaten Belitung memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup menjanjikan untuk pembangunan wilayah dimasa depan. Selain memiliki karakteristik wilayah yang unik yaitu kondisi geografi yang merupakan wilayah kepulauan dan potensi tambangnya yang pernah menjanjikan wilayah ini sebagai salah satu penghasil timah cukup besar di Indonesia. Kedua unsur unik ini mengakibatkan Kabupaten Belitung memiliki perkembangan yang berbeda dengan wilayah lainnya.

Sebagai wilayah yang pernah jaya serta mampu mensejahterakan masyarakatnya dengan tambang timah, saat ini Kabupaten Belitung berada dalam tahap transisi dalam perkembangan ekonominya, struktur ekonomi wilayah yang tadinya cukup berkembang dengan adanya kegiatan pertambangan timah, saat ini sejalan dengan makin menipisnya potensi tambang mengalami *deo line* yang cukup signifikan. Kondisi menuntut Pemerintah Daerah untuk merumuskan secara lebih mendalam visi dan misi pengembangan pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan sosial.

Berkembangnya masalah sosial, termasuk meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akibat dari krisis, konflik sosial, bencana alam dan gejala disintegrasi sosial membutuhkan penanganan secara komprehensif dan menyeluruh. Apabila permasalahan sosial tersebut tidak ditangani secara serius, maka dampak sosial berupa kerawanan sosial dan

tindak kejahatan akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial yang akhirnya menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar. Hal ini secara potensial akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Dalam era otonomi daerah, pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial lebih bernuansa pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah. implikasinya adalah bahwa kebijakan, strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal atau regional menjadi fokus pembangunan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang, dengan tetap berada dalam kerangka kesatuan pembangunan nasional.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 98 buah pulau besar dan kecil. Terdiri dari 5 kecamatan yaitu Tanjungpandan (16,50%), Membalong (39,65%), Badau (19,98%), Sijuk (18,05%), Selat Nasik (5,82%).³⁵

Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107⁰08' BT sampai 107⁰58' BT dan 02⁰30' LS sampai 03⁰15' LS dengan luas seluruhnya 229.369 ha atau kurang lebih 2.293,69 kilometer persegi.³⁶

Batas-batas wilayah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, *Belitung Dalam Angka (Belitung in figures) 2007*, hal 7

³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, *Belitung Dalam Angka (Belitung in figures) 2007*, hal. 3

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar³⁷

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2007 berjumlah 145.432 jiwa, mengenai perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan, dapat dilihat melalui sex ratio penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2007 adalah 102,65. Ini artinya bahwa ada 102,65 penduduk laki-laki di Kabupaten Belitung per 100 penduduk perempuan³⁸. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Belitung pada bulan Juli 2009 naik menjadi 163.873 jiwa, dengan jumlah laki-laki 84.161 jiwa dan perempuan 79.712 jiwa.³⁹

Komposisi mata pencaharian penduduk Kabupaten Belitung yakni petani, nelayan, sektor industri/tambang, PNS/BUMN, pedagang, sektor jasa dan sektor lainnya.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung

Adapun Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Belitung yang mandiri, maju, sejahtera, berdaya saing dan bermartabat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan

³⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, *Belitung Dalam Angka (Belitung in figures) 2007*, hal. 3

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung, *Belitung Dalam Angka (Belitung in figures,) 2007*, hal.29

³⁹ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung

dan pemberdayaan potensi daerah yang berpihak pada kerangka pembangunan sektoral, regional, dan global.

2. Misi

- 1) Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang berpijak pada aspek kelestarian lingkungan.
- 2) Menarik sebanyak-banyaknya investasi luar ke daerah untuk membuka akses berusaha masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
- 3) Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang dimiliki daerah melalui pengembangan industri hilir yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi.
- 4) Meningkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi pemerintah daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.
- 5) Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, terampil dan siap pakai, melalui penguatan fasilitas pendidikan umum dan kejuruan.
- 6) Mempercepat laju pembangunan kecamatan dan desa diseluruh wilayah Kabupaten Belitung yang berorientasi pada keunggulan karakteristik masing-masing wilayah.
- 7) Mendorong terciptanya rasa ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat melalui upaya pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

8) Mengisi kerangka pembangunan sektoral, regional, maupun global melalui optimalisasi segala potensi daerah baik potensi kewilayahan maupun sumber daya manusia.

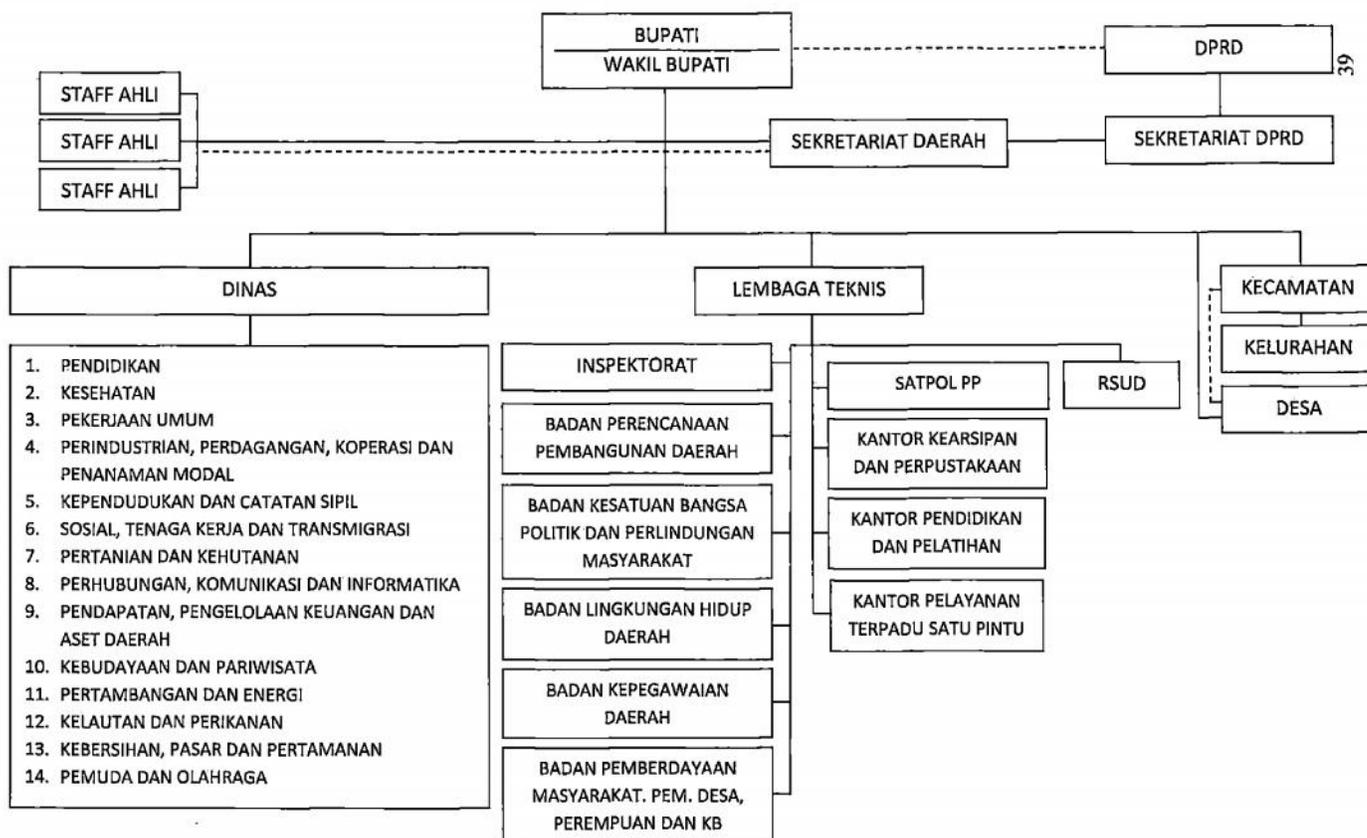
Dinas-dinas yang terdapat dalam susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut⁴⁰ :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Dinas Pertambangan dan Energi;
12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
13. Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan;
14. Dinas Pemuda dan Olah Raga;

Adapun susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung menurut Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No.9 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Belitung No.11 Tahun 2009

Tabel 2. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung



C. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang memberikan prioritas dalam berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, ketahanan sosial, kecacatan, korban bencana, pengangguran, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Pada implementasinya pembangunan kesejahteraan sosial tersebut di tingkat lokal/daerah kabupaten dikoordinasikan oleh Pemda Kabupaten. Pada tingkat masyarakat dipelopori oleh dunia usaha dan berbagai kelompok masyarakat seperti organisasi sosial, yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

Perkembangan sosial dan politik dalam pembangunan kesejahteraan sosial membawa serta tantangan dan peluang bagi ketersediaan tenaga dengan kualitas tenaga kesejahteraan sosial, profesional dan terlatih. Bersamaan dengan semakin berkembangnya permasalahan sosial mutakhir dan luasnya ruang lingkup tugas pembangunan kesejahteraan sosial, kebijakan untuk memperluas cakupan tenaga kesejahteraan sosial perlu memperoleh perhatian dan prioritas agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga kesejahteraan sosial yang kompeten, berkarakter dan berdaya inovasi tinggi dalam suatu bingkai kebersamaan, koordinasi sinergitas dan distribusi peran dalam penanganan masalah sosial dan ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung.

Visi dan Misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung

1. Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh ke depan karena instansi pemerintah harus dibawa agar tetap berfungsi sesuai tugas pokok dan fungsi, antisipatif, dan inovatif. Adapun visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung yaitu terwujudnya pelayanan dan pembinaan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi yang produktif, kompetitif, dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi dimasa mendatang untuk mewujudkan visi agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan 5 (lima) misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi yaitu :
 - a. Menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan menangkap nilai tambah sebesar-besarnya yang terwujud dari aktivitas yang dilaksanakan.
 - b. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang berpijak pada aspek kelestarian lingkungan.
 - c. Meningkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan.
 - d. Mempercepat laju pembangunan kawasan pedesaan yang berorientasi pada keunggulan komparatif masing-masing wilayah.
 - e. Menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Adapun misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung yaitu :

- a. Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran, sarana, dan prasarana dan disiplin aparaturnya.
- b. Mencegah, mengendalikan, dan mengatasi permasalahan sosial serta mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, perluasan, dan penempatan tenaga kerja.
- d. Meningkatkan hubungan industrial, perlindungan, pengawasan, dan kesejahteraan pekerja.
- e. Membangun sistem informasi manajemen sosial ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Untuk mendukung visi dan misi dinas yang telah ditetapkan, maka tujuan pembangunan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung, yaitu :

- a. Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparaturnya.
- b. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- c. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi.

- d. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
- e. Meningkatkan sistem informasi pelayanan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

2. Sasaran

- a. Terwujudnya pelayanan publik dan administrasi optimal.
- b. Meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan transmigrasi.
- d. Meningkatkan pengawasan, perlindungan tenaga kerja.
- e. Terbangunannya sistem informasi manajemen sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Persentase peningkatan pelayanan publik dan disiplin aparatur.
- b. Persentase peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta bantuan dan pemberdayaan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
- c. Persentase peningkatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
- d. Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja.
- e. Persentase ketersediaan sistem informasi manajemen sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Strategi

Strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Belitung yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah dan akan memberikan arah serta dorongan kegiatan operasional kepada para pelaksana kegiatan.

Adapun strategi dimaksud, sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana prasarana disiplin aparatur.
2. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta bantuan dan pemberdayaan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Peningkatan pelatihan, penempatan, pembinaan, dan pengawasan tenaga kerja.
4. Peningkatan sarana prasarana sistem informasi manajemen sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Kebijakan

Guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung, maka disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan administrasi perkantoran, penyediaan sarana prasarana, dan peningkatan disiplin aparatur.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang adil dan merata.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
4. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan.
5. Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan sistem informasi manajemen sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi.

Tabel 3. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1. Meningkatkan pelaksanaan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan disiplin aparatur	Terwujudnya pelayanan publik dan administrasi yang optimal	Persentase peningkatan pelayanan publik dan disiplin aparatur	Mengoptimalkan pelaksanaan administrasi perkantoran, penyediaan sarana prasarana dan peningkatan disiplin aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan disiplin aparatur 4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 	Dinsosnakertrans, Diklat
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatnya kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial masyarakat bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta bantuan dan pemberdayaan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang adil dan merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penanggulangan PMKS 2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 	

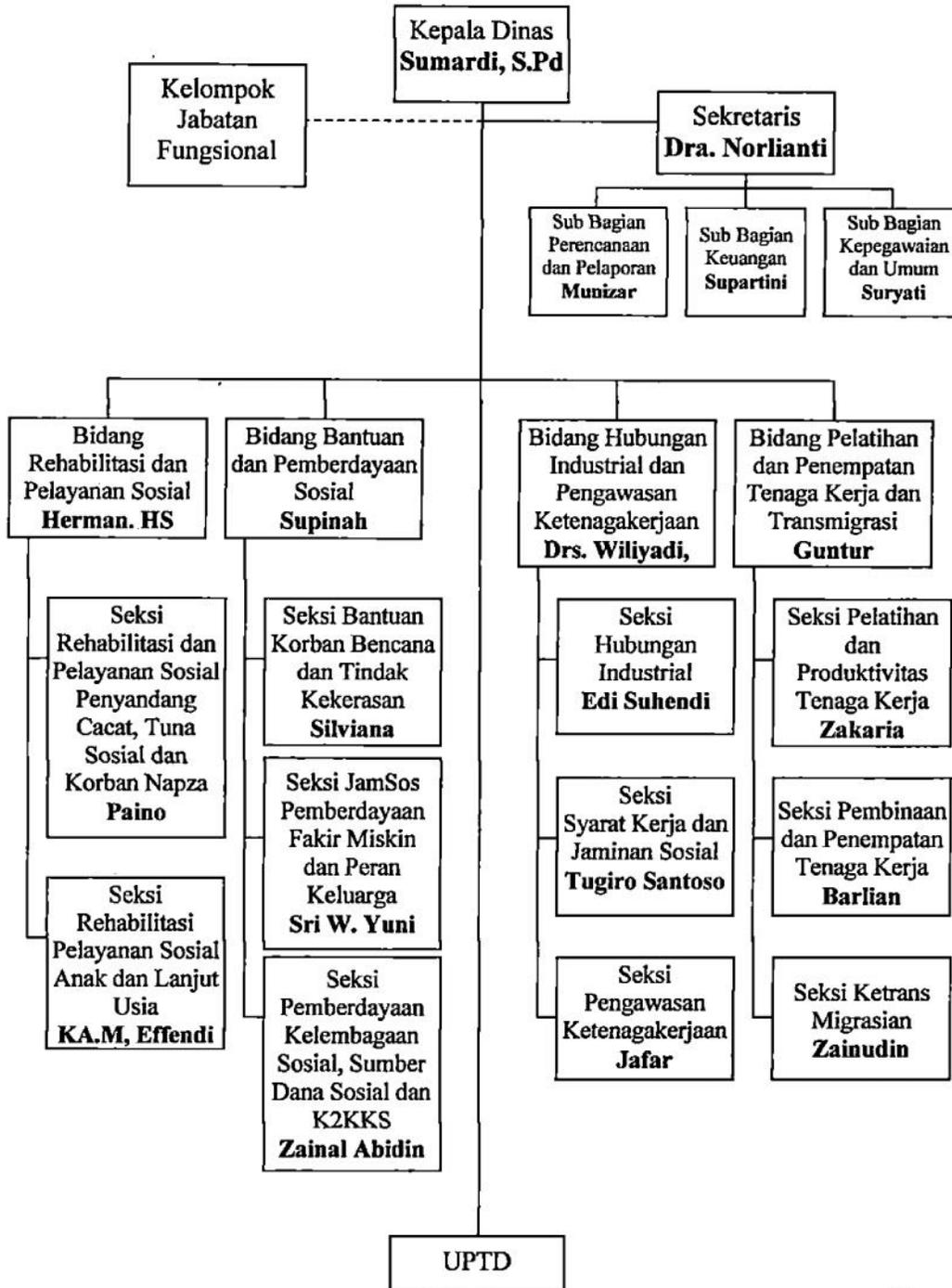
Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
		(PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)		3. Pembinaan anak terlanjar 4. Pembinaan penyandang cacat dan trauma 5. Pembinaan panti asuhan / panti jompo 6. Penanggulangan korban bencana 7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 8. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial 9. Pembinaan taruna siaga bencana	
3. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan transmigrasi	Persentase peningkatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Peningkatan kesempatan kerja 3. Pengembangan wilayah transmigrasi	

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
4. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	Meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja	Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	
5. Meningkatkan sistem informasi pelayanan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasian	Terbangunnya sistem informasi pelayanan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasian	Persentase ketersediaan sistem informasi manajemen sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi	Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan sistem informasi manajemen sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	

Struktur organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Belitung digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. Struktur Organisasi



D. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1. Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM)

Berdasarkan Kep. Menteri Sosial RI No.84/HUK/1998 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin dan UU No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin merupakan wadah usaha secara berkelompok para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang beranggotakan 5 orang atau sampai 10 orang yang memiliki satu atau beberapa keterampilan kerja. KUBE Fakir Miskin tersebut memiliki prinsip kebersamaan dalam mengelola usaha secara berkelompok, dimana anggotanya berdomisili dalam satu wilayah yang memungkinkan mereka saling berinteraksi.

Adapun tujuan dilaksanakannya program KUBE fakir miskin antara lain adalah untuk :

1. Terselenggaranya usaha ekonomi produktif penyandang maupun keluarga tidak mampu dalam kelompok guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Terbentuknya kepercayaan diri dan kemandirian keluarga tidak mampu
3. Terwujudnya kesejahteraan sosial
4. Mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
5. Mengentaskan kemiskinan, merubah pola hidup, sekaligus sebagai pengembangan usaha.

Program KUBE FM merupakan program perpanjangan tangan dari Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bangka Belitung yang kemudian diteruskan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung untuk di tindak lanjuti. Adapun Prosedur pelaksanaan KUBE FM adalah sebagai berikut :

- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung menerima surat dari Dinas Kesejahteraan Provinsi Bangka Belitung.
- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung menanggapi surat tersebut dan mendata nama-nama untuk diusulkan menjadi penerima bantuan KUBE FM melalui perpanjangan tangan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat Desa) dan TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan).
- Setelah data terkumpul, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung me-rekapitulasi data dan mengirimkannya ke Dinas Kesejahteraan Provinsi Bangka Belitung.
- Sebelum realisasi bantuan tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung menyeleksi dan mem-verifikasi calon-calon penerima bantuan yang tujuannya memberi penjelasan kepada calon penerima bantuan setelah penerima bantuan menerima bantuan tersebut maka masing-masing kelompok mulai mengembangkan usaha.
- Setelah masing-masing kelompok yang telah ditentukan menerima bantuan, Pendamping mulai memberi pengarahan kepada kelompok,

agar kelompok tersebut melaksanakan aturan pembukuan. Aturan pembukuan berupa jumlah pendapatan sehari, jumlah keuntungan sehari perorang kemudian di jumlah ke satu bulan, untuk dibandingkan sebelum dan sesudah bantuan diterima. Apabila hasilnya menurun maka bantuan akan di stop, hanya kelompok yang pendapatannya meningkat yang akan di usulkan untuk mendapat BLPS (Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial).

2. Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS).

Berdasarkan Kep. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial No: 146/PS.5/KPTS/VI/2009 Tentang Penetapan KUBE, Penerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS), BLPS adalah Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial yang diarahkan kepada KUBE-KUBE Fakir Miskin yang dinilai berkembang dan mandiri sebagai kelanjutan dari program bantuan KUBE dalam upaya memperkuat ketahanan dan kekuatan permodalan usaha. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang/permodalan dengan mekanisme penggunaannya untuk peningkatan dan pengembangan modal usaha kelompok.

Adapun Prosedur pelaksanaan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) adalah sebagai berikut :

- Masing-masing Ketua KUBE FM yang akan mendapat bantuan membuka rekening masing-masing dan tujuannya adalah bantuan langsung ke rekening dan tidak harus lewat Dinas Sosial Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Kabupaten Belitung melainkan langsung dari Kementrian RI, cq. Direktorat Pemberdayaan Sosial.

- Kelompok masing-masing menyusun atau membuat proposal tentang apa-apa yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Proposal kegiatan tersebut harus diketahui Dinas Sosial Kabupaten, desa/kelurahan, pendamping kabupaten, pendamping kecamatan dan pendamping desa.
- Setelah selesai di tandatangi oleh ketua kelompok, bendahara kelompok, dan pendamping. Masing-masing proposal tersebut kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung untuk diverifikasi kebenaran proposal tersebut. Jika verifikasi benar maka kelompok tersebut dibuatkan / diterbitkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung ke Bank yang telah ditunjuk.

3. Pemberdayaan Keluarga (perorangan)

Program Pemberdayaan Keluarga merupakan wadah usaha perorangan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bantuan Usaha ini diberikan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang masih dalam usia produktif, menikah diatas 5 tahun, dan umur maksimal 55 tahun. Bantuan ini diberikan untuk usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai mata pencaharian sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Bantuan ini berupa dana hibah, tidak untuk di kembalikan.

Kriteria-kriteria calon penerima bantuan program Pemberdayaan Keluarga secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari delapan meter persegi per orang.
2. Lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.⁴¹

Adapun bentuk bantuannya berupa barang-barang untuk usaha seperti : peternakan, nelayan, pembuat tikar, pembuat ambong, pembuat gula aren, bengkel, pembuat kue, pembuat atap daun, cetak batako, petani, warung makan, pertukangan, kelontong, kerupuk, salon, bengkel las, pembuat nasi uduk, penjual sayur, pertukangan, menjahit, dan lain-lain.

⁴¹ Sumber: Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung